

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPT TAHUN 2014**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPT Tahun 2014 dan Capaian Renstra BPMPT

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 telah diperoleh berbagai gambaran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, yang merupakan implementasi dari kebijakan operasional rencana strategis.

Dalam rangka mewujudkan tujuan misi **Misi Kedua** pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan, dalam rangka mewujudkan perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, telah ditetapkan sasaran yang harus dicapai pada pelaksanaan pembangunan untuk Tahun 2014, yang meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
2. Tersedianya bahan rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal;
3. Meningkatnya efektifitas promosi dan kerjasama investasi;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
5. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pelaksanaan Program Misi Kedua Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut kemudian ditindaklanjuti ke dalam Misi Kesatu BPMPT, yaitu mendorong terjadinya pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan *stakeholders*, dan mendorong lancarnya dunia usaha untuk memasukkan modalnya di Jawa Barat, sepanjang Tahun 2014.

Sedangkan dalam pelaksanaan Program pada **Misi Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik**, yang bertujuan mewujudkan Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang

ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis Kabupaten/Kota dengan manajemen lintas Kabupaten/Kota, telah ditetapkan sasaran yang direncanakan dicapai pada pelaksanaan pembangunan selama tahun 2014, yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan aparatur penanaman modal;
2. Terwujudnya optimalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Untuk merealisasikan kedelapan sasaran tersebut diatas telah dilaksanakan 11 (sebelas) program yang ditunjang 19 (sembilan belas) kegiatan yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
2. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Program Pengembangan Komunikasi, informasi, media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11. Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah

Dalam meralisasikan tujuan dan sasaran dari kedua misi di atas, telah dilaksanakan 11 (sebelas) program yang ditunjang 19 (sembilan belas) buah kegiatan, dengan pelaksanaan kinerja sebagai berikut :



Tabel 2.1
Pelaksanaan Kinerja BPMPT Tahun Anggaran 2014

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
I	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	1.100.000.000,00	1.026.381.000,00	93
1	Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal	800.000.000,00	733.383.400,00	92
2	Fasilitasi Koordinasi Perencanaan	300.000.000,00	292.997.6000	97
II	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	5.277.347.932,00	4.686.361.139,00	89
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN	300.000.000,00	265.003.130,00	88
2	Sinergitas Pelaksanaan Fasilitasi Investasi	800.000.000,00	720.368.500,00	90
3	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	203.154.384,00	196.778.500,00	97
4	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Investasi	250.000.000,00	249.378.800,00	99
5	Fasilitasi West Java Partner (WJP)	150.000.000,00	0	0
6	Penyusunan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat	300.000.000,00	261.955.000,00	87
7	Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi	3.274.193.548,00	2.992.877.209,00	91
III	Program Pengembangan Komunikasi, informasi, media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi	80.000.000,00	79.140.000,00	99
1	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan Berbasis Online System dan Integreted Electronic Filling system	80.000.000,00	79.140.000,00	99
IV	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	2.953.000.000,00	2.642.812.810,00	88
1	Optimalisasi Pelayanan Prima melalui penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu	500.000.000,00	339.585.000,00	68
2	Peningkatan kualitas Pengolahan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat	1.360.000.000,00	1.359.959.250,00	100
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perizinan dan informasi publik	1.093.000.000,00	943.268.560,00	86
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	395.200.000,00	219.500.000,00	56
1	Peningkatan Kemampuan Aparatur	395.200.000,00	219.500.000,00	56
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.428.645.000,00	1.099.691.535,00	77



1	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur	1.428.645.000,00	1.099.691.535,00	77
VII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.883.300.549,00	5.859.562.591,00	85
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	6.883.300.549,00	5.859.562.591,00	85
VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	748.450.000,00	714.185.322,00	95
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	748.450.000,00	714.185.322,00	95
IX	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.296.265.000,00	2.641.678.833,00	80
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.296.265.000,00	2.641.678.833,00	80
X	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	290.000.000,00	237.999.700,00	82
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SOPD	290.000.000,00	237.999.700,00	82
XI	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	250.000.000,00	200.337.800,00	80
1	Penyusunan dan Penyajian Data Investasi PMA/PMDN di Jawa Barat	250.000.000,00	200.337.800,00	80
	JUMLAH	22.690.808.481,00	19.407.650.730,00	85,5

Pada Tahun Anggaran 2014 kinerja yang telah dicapai BPMPT dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal, terlaksananya Musyawarah Koordinasi Teknis (Mukornis) Tiga Provinsi bidang Penanaman Modal, tersusunnya Renstra BKPPMD Tahun 2013 – 2018, terlaksananya keikutsertaan BKPPMD dalam KP3MN Tahun 2013 di Batam, terlaksananya keikutsertaan BKPPMD dalam kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Jawa Barat Tahun 2013, terlaksananya keikutsertaan BKPPMD dalam sosialisasi program/ kegiatan BKPM Tahun 2014, terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Invesda Expo 2013 di Yogyakarta, terlaksananya identifikasi bahan penyusunan standar biaya promosi dan penanaman modal dan terlaksananya perencanaan pengembangan promosi dan pemasaran produk khas daerah
2. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN, terlaksananya pembinaan dan pemantauan PMA/PMDN di Jawa Barat, terlaksananya kegiatan sosialisasi LKPM kepada PMA/PMDN di Jawa

Barat, terlaksananya sosialisasi Task Force di Jawa Barat, terselesaikannya permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat

3. Kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Fasilitasi Investasi, terlaksananya evaluasi pelaksanaan PTSP di Kabupaten/Kota, terlaksananya forum interaksi investor di Jawa Barat, terlaksananya fasilitasi investor, terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis SPIPISE
4. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal, tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMD) Jawa Barat, tersusunnya pedoman pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang penanaman modal, terlaksananya keikutsertaan Jawa Barat pada FKD anggota MPU
5. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Investasi, tersusunnya dokumen kajian kebijakan kerjasama investasi
6. Kegiatan Fasilitasi West Java Partner (WJP), kegiatan ini tidak dilaksanakan sehubungan dengan belum keluarnya Peraturan Gubernur mengenai kelembagaan West Java Partner (WJP)
7. Kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Jawa Barat, tersusunnya profil peluang investasi Jawa Barat bidang infrastruktur dan agrobisnis, tersusunnya informasi data potensi investasi Kabupaten/Kota se Jawa Barat melalui SIPID
8. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi, terlaksananya partisipasi Jawa Barat pada event Indonesia International Infrastructure, Gelar Potensi Investasi Daerah, Pekan Raya Jakarta, Titex Expo, Invesda Expo, Terselenggaranya West Java International Expo; Promosi Investasi Jawa Barat di Dubai serta Australia dan New Zealand; serta Fasilitasi dan Operasionalisasi Jawa Barat Center di Batam
9. Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Penanaman Modal di Daerah, tersusunnya instrumen kondisi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tersusunnya kajian minat investasi PMA/PMDN di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tersusunnya grafik perkembangan realisasi dan minat investasi di Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik BKPPMD, tersusunnya instrumen kondisi perusahaan PMA/PMDN di

Jawa Barat, tersusunnya kajian realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Barat, tersusunnya kajian minat investasi PMA/PMDN di Jawa Barat, tersusunnya grafik perkembangan realisasi dan minat investasi

11. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BKPPMD, tersedianya uang saku seminar, lokakarya, sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, diseminasi, diklat, bimbingan teknis, tersedianya biaya pendaftaran kursus singkat/pelatihan
12. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terlaksananya belanja obat-obatan; terlaksananya general check up bagi pegawai, tersedianya belanja jasa kantor; tersedianya bahan pakaian PDH; tersedianya pakaian olah raga; tersedianya biaya sewa lapangan olah raga
13. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, terpenuhinya administrasi perkantoran yang memadai untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran
14. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, terlaksananya belanja modal pembelian perlengkapan kantor, peralatan kantor, pengadaan komputer, pengadaan meubeulair, peralatan dapur, alat-alat komunikasi, pengadaan penerangan jalan taman, pengadaan konstruksi, pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua
15. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih, tersedianya biaya jasa kebersihan, tersedianya biaya bahan bakar, tersedianya belanja pemeliharaan alat listrik dan elektronik, tersedianya biaya perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan 4, tersedianya biaya perpanjangan STNK, terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan kantor, terlaksananya perbaikan ruangan kantor
16. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SOPD, tersusunnya RKA, DPA, DPPA, LAKIP, LPPD dan LKPJ

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BKPPMD Tahun 2008 – 2013 kinerja yang telah dicapai BKPPMD sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPPMD/BPMPT dan
Pencapaian Renstra BKPPMD/BPMPT s/d Tahun 2013



Provinsi Jawa Barat

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2013)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2013)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2013	
					Target Renja SKPD Tahun 2013	Realisasi Renja SKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Usuran Wajib									
1.36	Bidang Penanaman Modal									
1.36.	Program Peningkatan Iklim Investasi									
1.36.01	Kegiatan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dalam bidang penanaman modal	24 kegiatan	23 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	125	4 kegiatan	28 kegiatan	117
1.36.02	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat	1. Jumlah rancangan peraturan/ ketentuan di bidang promosi dan penanaman modal 2. Jumlah dokumen profil peluang investasi 3. Jumlah kerjasama investasi Government to Government, Private to Government, Private to Private	12 rancangan 6 dokumen 12 MoU	11 rancangan 5 dokumen 4 MoU	3 rancangan 1 dokumen 2 MoU	3 rancangan 1 dokumen 1 MoU	100 100 50	3 rancangan 1 dokumen 2 MoU	14 rancangan 6 dokumen 5 MoU	117 100 42
1.36.03	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN	1. Pembinaan peningkatan penyampaian LKPM 2. Jumlah penanganan permasalahan penanaman modal	24 kali 360 perusahaan	22 kali 360 perusahaan	6 kali 150 perusahaan	4 kali 150 perusahaan	67 100	6 kali 150 perusahaan	26 kali 360 perusahaan	108 100

1.37.01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Jumlah pelaksanaan promosi 2. Jumlah sarana dan prasarana promosi Trade, Tourism, Investment di provinsi lain	84 kali 2 buah	67 kali 1 buah	14 kali 1 buah	12 kali 1 buah	86 50	14 kali 1 buah	79 kali 1 buah	94 50
1.37.02	Kegiatan Sinergitas Fasilitasi Investasi	1. Jumlah fasilitasi penanaman modal yang diberikan bagi penanam modal 2. Jumlah pelaksanaan forum interaksi investor mitra Jawa Barat dalam bentuk forum	500 perusahaan 24 kali	440 perusahaan 17 kali	150 perusahaan 4 kali	180 perusahaan 0 kali	86,7 0	150 perusahaan 4 kali	620 perusahaan 17 kali	124 71

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, terlihat bahwa capaian Renstra BKPPMD/BPMPT Provinsi Jawa Barat telah mencapai rata-rata di atas 90 % meskipun ada beberapa yang masih dibawah 90 %, malahan ada yang masih mencapai 50 %, tetapi ada juga yang capaiannya diatas 100 %.

Untuk indikator kinerja jumlah sosialisasi, rapat koordinasi di bidang penanaman modal dari target sebanyak 24 kali sampai dengan tahun 2013 akan terealisasi sebanyak 28 kegiatan atau 117 %. Sedangkan untuk indikator jumlah rancangan peraturan/ketentuan di bidang promosi dan penanaman modal dari target 12 rancangan ketentuan/peraturan sampai dengan tahun 2013 terealisasi sebanyak 14 rancangan peraturan/ketentuan atau 117 %. Untuk indikator jumlah dokumen profil peluang investasi dari target sebanyak 6 dokumen sampai dengan tahun 2013 telah tercapai sebanyak 6 dokumen atau 100 %. Untuk indikator jumlah kerjasama investasi government to government, private to government dan private to private dari target sebanyak 12 MoU sampai dengan tahun 2013 terealisasi sebanyak 5 MoU atau sebesar 42 %.

Sementara untuk indikator pembinaan peningkatan penyampaian LKPM dari target sebanyak 24 kali pembinaan sampai dengan tahun 2013 terealisasi sebanyak 26 kali pembinaan atau sebesar 108 %. Untuk indikator jumlah penanganan permasalahan penanaman modal dari target sebanyak 360 perusahaan terealisasi sebanyak 360 perusahaan atau sebesar 100 %. Untuk indikator kinerja jumlah pelaksanaan promosi dari target sebanyak 84 kali terealisasi sebanyak 79 kali atau sebesar 94 %. Untuk indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana promosi Trade, Tourism and Investment dari target sebanyak 2 buah terealisasi sebanyak 1 buah atau sebesar 50 %.

Sementara untuk indikator kinerja jumlah fasilitasi penanaman modal yang diberikan kepada penanam modal dari target sebanyak 500 perusahaan terealisasi sebanyak 620 perusahaan atau sebesar 124 %. Dan untuk indikator kinerja jumlah pelaksanaan forum interaksi investor mitra Jawa Barat dalam bentuk forum dari target sebanyak 24 kali terealisasi sebanyak 17 kali atau sebesar 71 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPMPT

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMPT yaitu merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal serta melaksanakan kewenangan tertentu Pemerintah Provinsi sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Gubernur dan fungsinya adalah :

1. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis koordinasi promosi dan penanaman modal Daerah;
2. penyelenggaraan kesekretariatan, pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitasi investasi dan pengembangan investasi;
3. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB

Sesuai dengan tugas pokok fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada BPMPT lebih difokuskan pada promosi yang dilaksanakan BPMPT sehingga akan meningkatkan citra positif Jawa Barat di mata investor baik dalam maupun luar negeri. Selain itu kinerja BPMPT juga diukur dari peningkatan realisasi investasi di Jawa Barat setiap tahunnya, baik itu dari segi prosentase kenaikan realisasi investasi dari tahun ke tahun, jumlah nilai investasi, jumlah lapangan usaha/proyek serta penyerapan jumlah tenaga kerja. Kinerja BPMPT Provinsi Jawa Barat juga dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Jawa Barat. Tolak ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perijinan yang diberikan kepada investor.

Hasil kinerja pelayanan BKPPMD/BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Tahun 2008 – 2013 dapat dilihat dalam tabel 2.2 di bawah ini.



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPPMD/BPMPT
Provinsi Jawa Barat

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	Th.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
1	Meningkatnya realisasi investasi di Jawa Barat		12 – 14 %	10 %	12 %	12 %	14 %	54,25 %	4,61 %	12 %	77,52 %	:
2	Jumlah investasi (Trilyun)			17,77	18,7	19,68	20,72	46,602	48,751	52,68	93,52	
3	Meningkatnya jumlah lapangan usaha/ proyek yang ditanamkan investasinya di Jawa Barat			278	293	308	325	731	767	308	31.689	
4	Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat			59387	65985	73317	81463	218239	396710	73317	377.517	
5	Meningkatnya pelayanan dalam penanganan permasalahan investasi			6	6	6	6	6	6	6	6	
6	Meningkatnya minat investor ke Jawa Barat			20 %	20 %	20 %	25 %	11,32 %	28,12 %	20 %	11,86 %	
7	Meningkatnya citra positif Jawa Barat			90 %	95 %	95%	100 %	90 %	90 %	95 %	95 %	
8	Meningkatnya pelayanan secara efektif dalam bidang investasi dalam rangka peningkatan daya tarik investasi			95 %	97 %	97 %	97 %	90 %	90 %	95 %	95 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah digariskan dalam Pergub Nomor 21 Tahun 2015, BPMPT sebagai lembaga yang ditugasi untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang promosi, penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu mempunyai tugas yang cukup berat yaitu berusaha menarik investasi sebesar-besarnya ke wilayah Jawa Barat. Investasi mutlak diperlukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingat perannya yang dominan dalam pembangunan ekonomi daerah, selain memberikan efek pengganda (multiplier) pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat di lokalitas dimana investasi tersebut ditanam.

Walaupun Jawa Barat memiliki letak yang strategis karena kedekatan dengan Jakarta sebagai ibukota Negara juga memiliki potensi yang cukup sehingga Jawa Barat sampai saat ini masih tercatat sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta. Namun letak strategis dan banyaknya potensi yang dimiliki Jawa Barat untuk dipromosikan kepada investor tidak secara langsung memudahkan BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam menarik investasi sebesar-besarnya ke Jawa Barat. Banyak hambatan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kenaikan realisasi investasi di Jawa Barat yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat antara lain adalah :

- a. Jaminan keamanan dan kepastian hukum;
- b. Infrastruktur pendukung investasi yang kurang mendukung;
- c. Ketepatan waktu perijinan;
- d. Kepastian dan ketepatan biaya perijinan;
- e. Peraturan/ketentuan tentang penanaman modal;
- f. West Java Partnership;
- g. Fasilitasi investor;
- h. Profil dan peluang investasi;
- i. Pembinaan terhadap pelaku usaha;
- j. Sarana promosi investasi;

- k. Kerja sama investasi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta dan swasta dengan swasta.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2016 yang tengah disusun Bappeda Provinsi Jawa Barat, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 sebagian besar telah dapat menjawab isu-isu penting yang dihadapi BPMPT untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat.

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2016, BPMPT Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan program wajib bidang statistik, program wajib bidang otonomi daerah, program wajib bidang komunikasi dan informatika, program wajib penanaman modal dan program wajib bidang perencanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan pada program wajib bidang statistik adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pendataan Penanaman Modal di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Pengelolaan dan Publikasi Data Base Perijinan.

Program yang dilaksanakan pada program wajib bidang otonomi daerah adalah Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, dengan kegiatan :

- a. Evaluasi dan Monitoring dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Perijinan pada Objek Perijinan di Lapangan;
- c. Forum Sinergitas Tim Teknis Perijinan;
- d. Updating Persyaratan Perijinan Fasilitasi Pelayanan Perijinan;
- e. Fasilitasi Pelayanan Perijinan di 4 Gerai dan Layanan SMS.

Program yang dilaksanakan pada program wajib bidang komunikasi dan informatika adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan Secara Online

Program yang dilaksanakan pada program wajib penanaman modal adalah Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Sosialisasi Pelayanan Perijinan di Jawa Barat;
- c. Penyusunan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat;
- d. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal;
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Program yang dilaksanakan pada program wajib bidang perencanaan pembangunan adalah Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan dengan kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal dan Perijinan.

Rancangan awal RKPD Tahun 2016 BPMPT Provinsi Jawa Barat secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Provinsi Jawa Barat

BPMPT Provinsi Jawa Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					
1	Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Penanaman Modal di Daerah Provinsi Jawa Barat	Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah pembinaan	4 kali	550.000	Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Penanaman Modal di Daerah Provinsi Jawa Barat	Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah pembinaan	4 kali	600.000	
2	Pengelolaan dan publikasi data base perijinan	Bandung	Terpeliharanya data base perijinan	100 %	75.000	Pengelolaan dan publikasi data base perijinan	Bandung	Terpeliharanya data base perijinan	100 %	100.000	
II	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah					Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah					
3	Evaluasi dan Monitoring dan Pelayanan Perijinan Terpadu	Kab/Kota di Jawa Barat	Terlaksananya evaluasi dan monitoring	100 %	750.000	Evaluasi dan Monitoring dan Pelayanan Perijinan Terpadu	Kab/Kota di Jawa Barat	Terlaksananya evaluasi dan monitoring	100 %	796.000	
4	Penyelenggaraan Administrasi Permohonan	Kab/Kota di Jawa	Terlaksananya	100 %	1.400.000	Penyelenggaraan Administrasi	Kab/Kota di Jawa	Terlaksananya	100 %	1.483.248	

	Perijinan pada Objek Perijinan di Lapangan	Barat	penyelenggaraan permohonan perijinan			Permohonan Perijinan pada Objek Perijinan di Lapangan	Barat	penyelenggaraan permohonan perijinan			
5	Forum Sinergitas Tim Teknis Perijinan	Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah kegiatan	4 kali	80.000	Forum Sinergitas Tim Teknis Perijinan	Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah kegiatan	4 kali	80.750	
6	Updating Persyaratan Perijinan Fasilitas Pelayanan Perijinan	Kota Bandung	Terlaksananya updating	100 %	145.000	Updating Persyaratan Perijinan Fasilitas Pelayanan Perijinan	Kota Bandung	Terlaksananya updating	100 %	149.725	
7	Fasilitas Pelayanan Perijinan di Gerai dan Layanan SMS	Kab/Kota di Jawa Barat	Terlaksananya pelayanan di gerai dan SMS	100 %	800.000	Fasilitas Pelayanan Perijinan di Gerai dan Layanan SMS	Kab/Kota di Jawa Barat	Terlaksananya pelayanan di gerai dan SMS	100 %	850.000	
III	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi					
8	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan Secara Online	Kota Bandung	Terbangunnya sistem informasi	100 %	120.000	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan Secara Online	Kota Bandung	Terbangunnya sistem informasi	100 %	150.000	
IV	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi					Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi					
9	Kegiatan Fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi	Bandung, Jawa Barat, Luar Provinsi, Luar Negeri	Jumlah event/ kegiatan promosi	14 kali	4.500.000	Kegiatan Fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi	Bandung, Jawa Barat, Luar Provinsi, Luar Negeri	Jumlah event/ kegiatan promosi	14 kali	5.000.000	
10	Sosialisasi Pelayanan Perijinan di Jawa Barat	Kab/Kota di Jawa	Jumlah kegiatan	6 kali	250.000	Sosialisasi Pelayanan Perijinan di Jawa Barat	Kab/Kota di Jawa	Jumlah kegiatan	6 kali	300.000	

		Barat					Barat				
11	Publikasi Kawasan Geopark Ciletuh	Kab. Sukabumi	Jumlah event/ kegiatan sosialisasi	3 kali	2.000.000	Publikasi Kawasan Geopark Ciletuh	Kab. Sukabumi	Jumlah event/ kegiatan sosialisasi	3 kali	1.500.000	
12	Kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat	Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah dokumen	1 dokumen	500.000	Kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat	Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah dokumen	1 dokumen	600.000	
13	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Bandung	Jumlah dokumen	1 dokumen	2.000.000	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Bandung	Jumlah dokumen	1 dokumen	2.250.000	
14	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap perusahaan	6 kali	750.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap perusahaan	6 kali	950.000	
III	Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan										
15	Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/ Kegiatan Penanaman Modal dan Perijinan	Bandung, Jawa Barat, Luar Provinsi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan monitoring kegiatan	6 kali	1.00.000	Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/ Kegiatan Penanaman Modal	Bandung, Jawa Barat, Luar Provinsi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan monitoring kegiatan	6 kali	1.250.000	

Secara umum program yang akan dilaksanakan BPMPT pada tahun anggaran 2016 sebagaimana dalam rancangan awal RKPD telah dapat menjawab isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPMPT serta telah sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 serta Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok BPMPT yaitu sebagai lembaga yang ditugasi untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang promosi dan penanaman modal, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat sedikit yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, program dan kegiatan yang dilaksanakan BPMPT hanya berhubungan dengan pelaku usaha dan investor yang menanamkan investasinya di Jawa Barat sehingga dalam kegiatan Musrenbang menampung usulan program dan kegiatan dari PDKPM kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat yang telah dibahas bersama (PDKPM kab/kota, BPMPT dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat) yang mengakomodir dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.